



BAPPEDA
KOTA BANDAR LAMPUNG

VOLUNTARY LOCAL REVIEWS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Kota Bandar Lampung
TAHUN 2022



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	4
Daftar Tabel	5
Abreviasi	6
Kata Pengantar Penyusun	8
Executive Summary	9
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1. Latar Belakang	12
1.2. Profil Kota	13
1.3. Metodologi	16
BAB 2 KONDISI TERKINI	19
2.1. Komitmen Terhadap SDGs	20
2.2. Tantangan Pencapaian SDGs	21
BAB 3 TARGET, INDIKATOR, DAN PROGRAM	25
3.1. Pilar Pembangunan Sosial	26
3.1.1. Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	26
3.1.3. Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	28
3.1.2. Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	29
3.2. Pilar Pembangunan Ekonomi	32
3.2.1. Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	32
3.2.1. Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	33
3.2.2. Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	34
3.3. Pilar Pembangunan Lingkungan	35
3.3.1. Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	35
3.3.2. Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	36
3.3.3. Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	37
3.3.3. Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	38

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1. Kesimpulan.....	40
4.2. Saran.....	46
LAMPIRAN.....	49
Tabel 5.1. Program Terkait SDGs 3.....	50
Tabel 5.2. Program Terkait SDGs 5 (5.1 & 5.2)	52
Tabel 5.3. Program Terkait SDGs 5 (5.5)	57
Tabel 5.4. Program Terkait SDGs 9.....	58
Tabel 5.5. Program Terkait SDGs 10.....	59
Tabel 5.6. Program Terkait SDGs 6.....	60
Tabel 5.7 Program Terkait SDGs 11	61
Tabel 5.8. Program Terkait SDGs 12.....	62
Tabel 5.9. Program Terkait SDGs 14.....	63

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Peta Administratif Kota Bandar Lampung

Gambar 2. 1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Gambar 4.1. Target dan Indikator Pilar Sosial pada PD Kota Bandar Lampung

Gambar 4.2. Target dan Indikator Pilar Ekonomi pada PD Kota Bandar Lampung

Gambar 4.3. Target dan Indikator Pilar Lingkungan pada PD Kota Bandar Lampung

Gambar 4.4. Alokasi Pembiayaan Terkait SDGs pada PD Kota Bandar Lampung

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020

Tabel 1.2. Pemetaan Data Indikator TPB/SDGs pada PD Kota Bandar Lampung

Tabel 3.1. Target Pencapaian SDGs 3

Tabel 3.2. Target Pencapaian SDGs 4

Tabel 3.3. Target Pencapaian SDGs 5 (5.1 dan 5.2)

Tabel 3.4. Target Pencapaian SDGs 5 (5.5)

Tabel 3.5. Target Pencapaian SDGs 8

Tabel 3.6. Target Pencapaian SDGs 9

Tabel 3.7. Target Pencapaian SDGs 10

Tabel 3.8. Target Pencapaian SDGs 11

Tabel 3.9. Target Pencapaian SDGs 12

Tabel 3.10. Target Pencapaian SDGs 14

Tabel 5.1. Program Terkait SDGs 3

Tabel 5.2. Program Terkait SDGs 5 (5.1 & 5.2)

Tabel 5.3. Program Terkait SDGs 5 (5.5)

Tabel 5.4. Program Terkait SDGs 9

Tabel 5.5. Program Terkait SDGs 10

Tabel 5.6. Program Terkait SDGs 6

Tabel 5.7 Program Terkait SDGs 11

Tabel 5.8. Program Terkait SDGs 12

Tabel 5.9. Program Terkait SDGs 14

Abreviasi

APBD	:	Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional
BKD	:	Badan Kepegawaian Daerah
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease</i>
CRIC	:	<i>Climate Resilience Inclusive Cities</i>
Dinas PMK	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota
Dinas PPKB	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas PPPA	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Perkim	:	Dinas Perumahan dan Permukiman
Dinas PU	:	Dinas Pekerjaan Umum
Disdikbud	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dispar	:	Dinas Pariwisata
DKP	:	Dinas Kelautan dan Perikanan
DPM	:	Dokter Praktik Mandiri
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
HIV	:	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IMS	:	Infeksi Menular Seksual
IT	:	<i>Information Technology</i>
KB	:	Keluarga Berencana
Kementerian PPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemempupera	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KIE	:	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KLA	:	Kota Layak Anak
KRR	:	Kesehatan Reproduksi Remaja
Lansia	:	Lanjut Usia
MKJP	:	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Monev	:	<i>Monitoring and Evaluation</i>
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Perda	:	Peraturan Daerah
Posbindu	:	Pos Pembinaan Terpadu
Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpadu
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
SLS	:	Satuan Lingkungan Setempat
TFR	:	<i>Total Fertility Rate</i>
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UCLG ASPAC	:	<i>United Cities and Local Governments Asia Pacific</i>

UKBM : Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah
VLR : *Voluntary Local Review*

Kata Pengantar Penyusun

Peran pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangatlah besar karena sebagian besar target dan indikator dalam TPB/SDGs terkait dengan agenda pemerintah daerah. Oleh karena itu pencapaian SDGs sebagian besar ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target-target yang telah ditentukan dalam proses pembangunan daerah. Sebagai contoh, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan kepada masyarakat terkait dengan sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, pengelolaan sampah, dan lain-lain. Kesemuanya secara langsung terkait dengan masing-masing tujuan yang ada dalam SDGs.

Kota sebagai kawasan yang akan menjadi tumpuan sebagian besar populasi dunia di masa depan memerlukan komitmen yang tinggi dari pengelolanya yaitu Pemerintah Kota untuk menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah kota-kota di dunia mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan kontribusinya yang tidak sedikit dalam agenda pembangunan berkelanjutan global saat ini yaitu TPB/SDGs. Tidak terkecuali Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung telah berkomitmen untuk mencapai target-target dan indikator-indikator yang ditetapkan dalam TPB/SDGs. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs/TPB Kota Bandar Lampung 2020-2024. Harapannya sebagai kota terbesar di Provinsi Lampung dan juga “pintu masuk” ke Pulau Sumatera, Kota Bandar Lampung akan lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan dari berbagai dimensi yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum serta tata kelola melalui komitmennya terhadap pencapaian TPB/SDGs tersebut.

Untuk mengukur langkah-langkah kongkrit yang telah atau akan dilakukan dalam komitmen Kota Bandar Lampung terhadap TPB/SDGs diperlukan suatu *tool* berupa dokumen yang up-to-date dan efektif dalam mendokumentasikan sekaligus mengkaji progres pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu disusunlah dokumen Voluntary Local Review (VLR) yang mengacu kepada data dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Dokumen VLR Kota Bandar Lampung tahun 2022 ini disusun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berkolaborasi dengan akademisi dan lembaga terkait dengan melalui tahapan pengumpulan data, pembahasan draft awal, dan finalisasi dokumen akhir. Dokumen VLR ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kota di Bandar Lampung sekaligus menjadi percontohan bagi pemerintah kota/kabupaten lain di Provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Tim Penyusun

Executive Summary

Kota Bandar Lampung telah berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditunjukkan dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs/TPB Kota Bandar Lampung 2020-2024. Ini selaras dengan dokumen RAD SDGs/TPB Provinsi Lampung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Komitmen dalam perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung pun ditunjukkan dengan telah diselarasakannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021-2026 dengan tujuan dan target dalam SDGs.

Prioritas diberikan pada kegiatan-kegiatan baik yang dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian SDGs. Ini menegaskan komitmen dari Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, terhadap SDGs Kota Bandar Lampung dengan tetap melalui prosedur evaluasi dan target kinerja. Dokumen VLR ini disusun untuk mendokumentasikan target SDGs dan program untuk pencapaian target tersebut di Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 2022 ini. Tidak semua tujuan dalam SDGs dapat terliput progresnya, melainkan berdasarkan data indikator yang dapat dikumpulkan serta dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai kebijakan, perencanaan, dan program kegiatan unggulan yang terkait dengan tujuan SDGs tertentu. RAD SDGs Kota Bandar Lampung 2020-2024 dijadikan sebagai salah satu dasar utama dalam melihat progress dan pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung.

Dokumen VLR TPB/SDGs Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini telah berhasil mengidentifikasi komitmen Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap sebagian target dan indikator dari 10 TPB/SDGs yaitu Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 3, 4, 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (Tujuan 8, 9, 10), dan Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 14). Sementara untuk target dan indikator pada tujuan-tujuan yang lain belum dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini dapat diakibatkan karena kurang lengkapnya data yang didapatkan atau pun memang dikarenakan belum terakomodirnya target dan indikator dari tujuan-tujuan tersebut dalam program dan kegiatan pemerintah daerah. Atau memang target dan indikator yang ingin dicapai bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat.

Sepuluh tujuan tersebut merupakan modal dasar untuk membuat prioritas dalam pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan telah ditemukannya keterkaitan antara target SDGs dan program kegiatannya yang ditetapkan untuk mencapainya dalam Perangkat Daerah terkait. Juga indikator dan data-data yang harus dilengkapi untuk memperoleh indikator pun sudah jelas sehingga memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi. Adanya program dan kegiatan pada Perangkat Daerah tersebut juga menandakan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau implementasi program. Dari 10 tujuan tersebut diketahui total anggaran sebesar Rp. 633.588.840.295,00 telah disiapkan untuk

pencapaian target-target TPB/SDGs. Dari rincian alokasi pembiayaan ini dapat terlihat bahwa walaupun 10 tujuan dari 17 TPB/SDGs telah teridentifikasi target dan indikatornya pada perangkat daerah, namun hanya 8 tujuan yang memiliki anggaran yang terkait jelas dan langsung dengan pencapaian target tujuan masing-masing. Dan dari ke-8 tujuan yang terbagi ke dalam masing-masing perangkat daerah ini terlihat ketimpangan anggaran yang cukup tinggi di mana anggaran untuk Tujuan 9 yang terkait dengan infrastruktur berkelanjutan memiliki anggaran yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pada tujuan yang lain. Tujuan 11 yang menempati urutan kedua pun hanya sekitar sepertiga dari anggaran dari Tujuan 9. Ini dapat mengindikasikan bahwa prioritas pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung masih terfokus pada pembangunan fisik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bandar Lampung telah berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditunjukkan dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs/TPB Kota Bandar Lampung 2020-2024. Ini selaras dengan dokumen RAD SDGs/TPB Provinsi Lampung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Komitmen dalam perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung pun ditunjukkan dengan telah diselaraskannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021-2026 dengan tujuan dan target dalam SDGs. Begitu juga dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Visi Kota Bandar Lampung 2020-2025 yaitu: “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat” yang tertuang pada RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 mendatang dengan tema pembangunan yang sangat terkait dengan SDGs yaitu: “Percepatan Pemulihan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan”. Peraturan-peraturan daerah lainnya yang mendukung pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kesehatan Lingkungan
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
8. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 242/IV.01/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Implementasi *Sustainable Development Goals* Kota Bandar Lampung Tahun 2021
9. Keputusan Walikota Nomor 698/IV.01/HK Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim (*Climate Resilient and Inclusive Cities*) Kota Bandar Lampung
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung

Prioritas diberikan pada kegiatan-kegiatan baik yang dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian SDGs. Ini menegaskan komitmen dari Wali Kota Bandar Lampung terhadap SDGs Kota Bandar Lampung dengan tetap melalui prosedur evaluasi dan target kinerja. Begitu juga dengan pembiayaan kegiatan baik dari APBD, APBN, ataupun sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagai stimulan untuk pembangunan berkelanjutan.

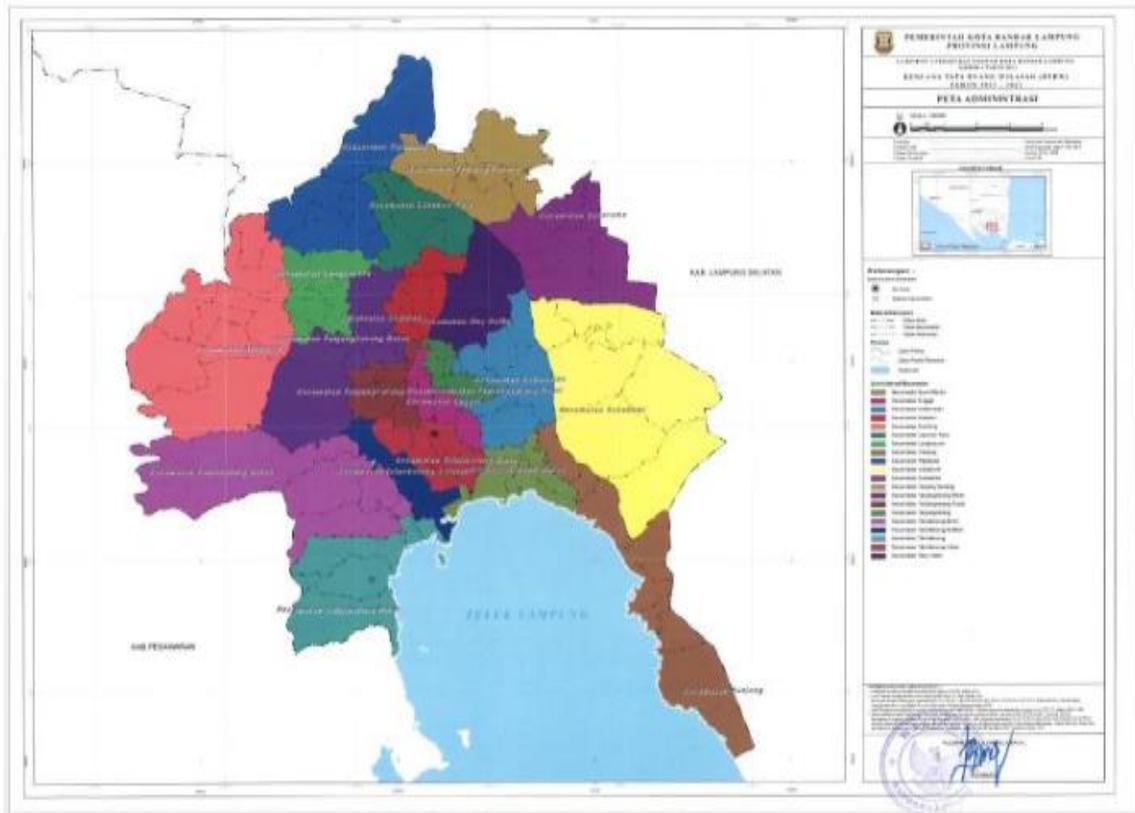
1.2. Profil Kota

Kota Bandar Lampung atau yang dikenal sebagai Kota Tapis Berseri merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung yang terkenal sebagai gerbang masuk Pulau Sumatera. Dengan seperti itu Bandar Lampung memiliki keuntungan dari segi akses mobilisasi dan juga pariwisata. Bandar Lampung merupakan ibu kota yang pusat pemerintahannya terletak di kawasan yang secara historis dikenal sebagai Teluk Betung. Kota Bandar Lampung berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya:

1. Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Natar di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran.
4. Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang di Kabupaten Lampung Selatan.

Pada awalnya, Kota Bandar Lampung merupakan gabungan antara “kota kembar” di masa lampau yaitu Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung yang mana kedua kota tersebut mulanya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 kedua kota tersebut terpisah dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan ± 18.377 Ha ($183,77$ km²) dengan panjang garis pantai sepanjang 35,6 km dan luas perairan $\pm 11,56$ Ha yang terdiri atas Pulau Kubur (0,96 Ha) dan Pulau Pasaran (10,6 Ha). Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Peta administratif Kota Bandar Lampung tersaji pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1. Peta Administratif Kota Bandar Lampung
 Sumber: RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041,
 (Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2022)

Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Bandar Lampung juga memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung dapat berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung berpotensi untuk menjadi Kota Metropolitan. Pada tahun 2015, Kota Bandar Lampung dipetakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) sebagai salah satu kawasan yang berpotensi menjadi area metropolitan, terkhusus dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api. Keunggulan Kota Metropolitan ini adalah menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa industri, pariwisata serta pendidikan.

Pada tahun 2020, penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 1.166.066 jiwa dengan sex ratio 103,9 yang berarti terdapat sejumlah 103,9 penduduk laki-laki pada tiap 100 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 21.220 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 3.215 jiwa/km². Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin pada tahun 2020:

Tabel 1.1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Telukbetung Barat	21.224	19.872	41.096	106,8
Telukbetung Timur	27.852	26.022	53.874	107,0
Telukbetung Selatan	21.866	21.004	42.870	104,1
Bumi Waras	32.627	30.539	63.166	106,8
Panjang	41.257	39.554	80.811	104,3
Tanjung Karang Timur	21.946	21.130	43.076	103,9
Kedamaian	29.435	28.470	57.905	103,4
Telukbetung Utara	27.258	26.294	53.552	103,7
Tanjung Karang Pusat	28.534	27.391	55.925	104,2
Enggal	14.416	14.233	28.649	101,3
Tanjung Karang Barat	33.464	32.090	65.554	104,3
Kemiling	45.065	43.509	88.574	103,6
Langkapura	22.205	21.364	43.569	103,9
Kedaton	29.027	28.309	57.336	102,5
Raja Basa	29.495	28.094	57.589	105,0
Tanjung Senang	31.458	30.710	62.168	102,4
Labuhan Ratu	26.415	25.978	52.393	101,7
Sukarame	34.345	33.380	67.725	102,9
Sukabumi	38.822	37.048	75.870	104,8
Way Halim	37.581	36.783	74.364	102,2
2020	594.292	571.774	1.166.066	103,9
2019	528.804	522.696	1.051.500	101
2018	520.078	513.725	1.033.803	101
2017	511.371	504.539	1.015.910	101
2016	502.418	495.310	997.728	101

Sumber: Kota Bandar Lampung dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung serta perpindahan penduduk baik antar wilayah di dalam Kota Bandar Lampung maupun dari luar Kota Bandar Lampung yang masuk ke Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2018 dan 2019, secara umum kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung cukup baik. Pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kisaran 6 persen yakni 6,21 persen (Tahun 2018) dan 6,24 persen (Tahun 2019). Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19 maka pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi daerah Kota Bandar Lampung terkonstraksi sebesar 1,85 persen. Perkembangan inflasi daerah dalam kurun waktu/periode yang sama (tahun 2018 dan 2019) berada dikisaran angka 2,5 persen hingga 3,5 persen per tahun sedangkan pada tahun 2020 inflasi sebesar 1,93 persen. Laju inflasi tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2018-2019. Hal ini dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat COVID-19.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung atas dasar-dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 59.377 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4.768 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang bernilai 54.609 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020, nilai PDRB Kota Bandar Lampung atas dasar-dasar harga berlaku pada tahun 2020 hanya mencapai sebesar 59.078 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB

ini mengalami penurunan sebesar 299 miliar jika dibandingkan tahun 2019. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar dari produksi pada lapangan usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan. Dari 39.385 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 38.656 miliar rupiah pada tahun 2020. Penurunan PDRB ini tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha dan akibat COVID-19. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 1,85 persen. Tiga kategori/lapangan usaha yang paling besar mengalami kontraksi pada tahun 2020 adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,38 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 10 persen dan industri pengolahan sebesar 4,27 persen. Namun demikian terdapat beberapa kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020. Adapun kategori/ lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif paling besar adalah informasi dan komunikasi sebesar 8,75 persen. Peningkatan penggunaan internet untuk berbagai aktivitas pada perkantoran, pendidikan dan perdagangan di masa pandemik yang menyebabkan kategori ini mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020.

1.3. Metodologi

Dokumen VLR SDGs Bandar Lampung Tahun 2022 ini disusun dengan menggunakan metodologi literature dan metode survey dimana penyusunannya yang terdiri dari pengumpulan data, pembahasan draft awal, dan finalisasi dokumen akhir. Pengumpulan data dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan lokakarya penyusunan VLR yang mengundang perangkat daerah pada Dinas dan instansi terkait. Pada kegiatan ini dipaparkan mengenai tujuan dan sistematika penyusunan VLR serta kebutuhan data dan informasi yang terkait dengan pencapaian target-target SDGs beserta indikator-indikatornya.

Sebagai luaran dari kegiatan lokakarya ini, didapatkan pemetaan mengenai data indikator yang diperlukan dan dinas/instansi yang terkait dengan masing-masing data indikator tersebut. Dan sebagai tindak lanjut dari pemetaan data indikator tersebut, perwakilan dari dinas/instansi ditugaskan untuk mengumpulkan data indikator yang terkait dengan dinas/instansinya masing-masing kepada tim penulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dari data yang terkumpul, tim penulis kemudian menyusun draft awal dokumen VLR untuk dibahas secara internal. Hasil pembahasan draft awal ini dijadikan dasar untuk evaluasi dan finalisasi dokumen VLR SDGs Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.2. Pemetaan Data Indikator TPB/SDGs pada OPD Kota Bandar Lampung

NO	PILAR SDGs	NAMA DINAS / INSTANSI	INDIKATOR
1	<u>Pilar Pembangunan Sosial</u> -SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) -SDG 2 (Tanpa Kelaparan) -SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) -SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) -SDG 5 (Keseimbangan Gender)	Dinas Ketahanan Pangan	2.1.1 2.1.2 2.2.2.(a)
		Dinas Pertanian	2.2.1 2.4.1.(a)
		Dinas PPKB	3.7.1* 3.7.2* 3.7.2.(a)
		Dinas PPPA	5.1.1* 5.2.1 5.2.2 5.5.1 5.5.2
2	<u>Pilar Pembangunan Ekonomi</u> -SDG 7 (Energi Bersih Dan Terjangkau) -SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) -SDG 9 (Industri Inovasi dan Infrastruktur) -SDG 10 (Kurangnya kesenjangan) -SDG 17 (Kemitraan)	Dinas Koperasi dan UKM	8.3.1.(a)
		Dinas Pariwisata	8.9.1.(a) 8.9.1.(b) 8.9.1.(c)
		Dinas PU	9.1.1.(a)
		Dinas Perindustrian	9.3.1
		Dinas PMK	10.1.1.(b) 10.1.1.(c) 10.1.1.(d) 10.1.1.(e) 10.1.1.(f)
		Dinas Lingkungan Hidup	6.3.1.(a) 6.3.2.(a) 6.3.2.(b) 6.4.2.(a) 6.4.2.(b) 11.6.2.(b) 11.6.1.(a) 12.1.1 12.4.2* 12.5.1.(a) 13.2.1* 13.2.2* 13.2.2.(a) 13.2.2.(b) 13.3.1.(a) 13.a.1.(a) 15.3.1* 15.4.1*
3	<u>Pilar Pembangunan Lingkungan</u> -SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) -SDG 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan) -SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) -SDG 13 (Perubahan Iklim) -SDG 14 (Ekosistem Lautan) -SDG 15 (Ekosistem Daratan)	Dinas PU	6.1.1* 6.2.1*
		Dinas Perumahan dan Permukiman	11.1.1.(a) 11.7.1.(a)
		Dinas Pariwisata	12.b.1.(a)
		Dinas Kelautan dan Perikanan	14.4.1* 14.7
		BPKAD	16.6.1 16.6.1*
4	<u>Pilar Hukum dan Tata Kelola</u> -SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)		

Dokumen VLR ini disusun untuk mendokumentasikan progres pencapaian target-target SDGs di Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 2022 ini. Dari total 169 indikator target Tidak semua tujuan dalam SDGs dapat terliput progresnya, melainkan berdasarkan data indikator yang dapat dikumpulkan serta dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai kebijakan, perencanaan, dan program kegiatan unggulan yang terkait dengan tujuan SDGs

tertentu. RAD SDGs Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai salah satu dasar utama dalam melihat progress dan pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 2

KONDISI TERKINI

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun RAD TPB/SDGs Kota Bandar Lampung melalui serangkaian kegiatan yang salah satunya adalah *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk menghimpun segala informasi, persepsi, serta mengadvokasi bersama dengan akademisi dan sektor terkait lainnya. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah melakukan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Pencapaian TPB/SDGs dalam bentuk kegiatan *workshop*.

Tujuan *monitoring* atau pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan yang akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

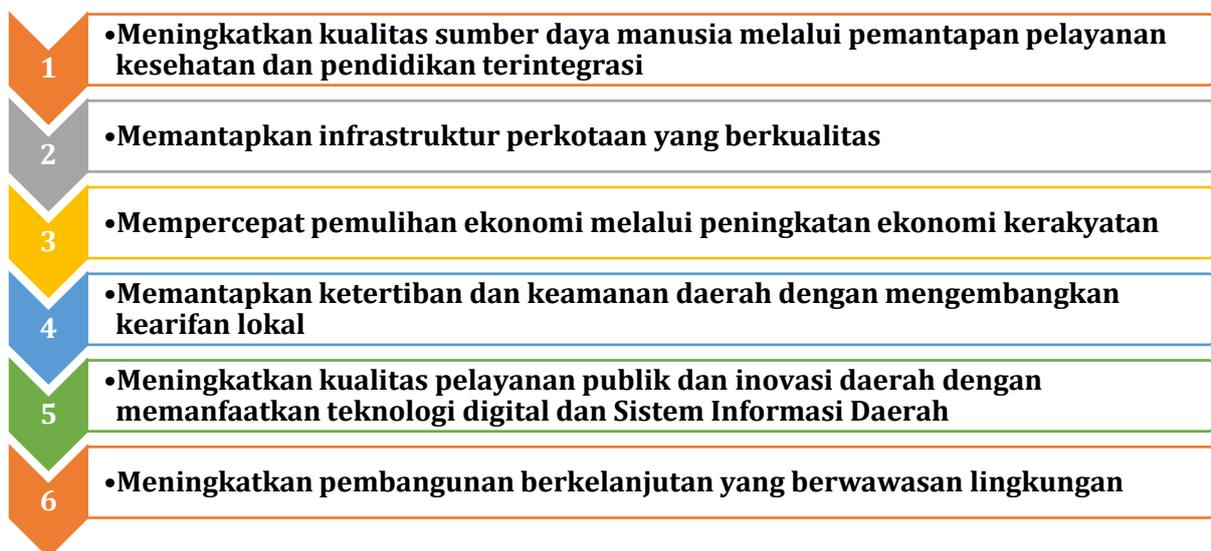
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun nonpemerintah. Dalam implementasi program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RAD TPB/SDGs Kota Bandar Lampung dapat diketahui beberapa komitmen dan kondisi terkini yang menjadi tantangan sehingga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen VLR ini dan perencanaan selanjutnya.

2.1. Komitmen Terhadap SDGs

Mulai dari komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui sanitasi dengan fokus kepada pengelolaan air limbah domestik. Hal ini selaras dengan target-target dalam Tujuan 6 (enam) SDGs yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak. Terkait dengan komitmen yang lain, pengentasan permasalahan stunting menjadi salah satu fokus penting karena terkait dengan setidaknya empat tujuan dalam SDGs yaitu Tujuan 1 (satu) Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 (dua) Tanpa Kelaparan, Tujuan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, dan Tujuan 4 (empat) Pendidikan yang Berkualitas. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan penurunan angka stunting menjadi 16% di tahun 2022 dari sebelumnya 19,4 persen di tahun 2021. Salah satu pencapaian yang terkait dengan isu ini adalah pada tahun 2022, Kota Bandar Lampung meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Selanjutnya terkait Tujuan ke lima (5) Kesetaraan Gender juga menjadi perhatian khusus dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung fokus juga melakukan pengelolaan limbah domestik dan lumpur tinja. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan peluncuran strategi komunikasi perubahan perilaku (KPP) sanitasi aman Kota Bandar Lampung. Kebijakan ini selain menunjukkan komitmen terhadap pencapaian Tujuan 6 (enam) juga terkait erat dengan Tujuan 12 yaitu Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Kemudian, Proyek CRIC (*Climate Resilience Inclusive Cities*) yang didanai oleh Uni Eropa dan bekerja sama dengan UCLG ASPAC (*United Cities and Local Governments Asia Pacific*) merupakan program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan Tujuan 13 tentang perubahan iklim. Sedangkan upaya kolaborasi Pemkot dan DPRD Bandar Lampung dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional lewat digitalisasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) berhubungan dengan Tujuan 8 (delapan) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar 2. 1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
(Bappeda Kota Bandar Lampung, 2022)

2.2. Tantangan Pencapaian SDGs

2.2.1. Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

1. Pada tahun 2020, pencapaian pelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan ibu melahirkan/bersalin secara berurutan sebesar 94,20% dan 95,64%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2019) terjadi penurunan namun tidak signifikan. Dengan kondisi pandemi Covid-19, Kota Bandar Lampung masih mampu melaksanakan kegiatan pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut secara maksimal.

2. Pada saat ini setiap kelurahan di Kota Bandar Lampung (126 kelurahan) telah memiliki Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu). Keberadaan Posbindu ini sama halnya dengan Posyandu yaitu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) artinya keberadaan Posbindu ini dibentuk oleh dan untuk masyarakat dengan difasilitasi oleh petugas kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Namun belum semua Posbindu dilengkapi dengan sarana penunjang pemeriksaan Posbindu Kit seperti peralatan cek gula darah, kolesterol dan belum adanya petugas terlatih di setiap Puskesmas untuk pengelolaan pasien dengan gangguan jiwa. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk pembiayaannya.
3. Pencapaian hasil kegiatan pada jenis pelayanan kesehatan terhadap orang yang terduga menderita Tuberkulosis sebesar 23.987 orang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 30.094 orang atau hanya mencapai 79,70%. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya upaya petugas Puskesmas dalam penemuan kasus suspek Tuberkulosis dan belum maksimalnya klinik kesehatan, Dokter Praktik Mandiri (DPM) dalam melaporkan kasus suspek Tuberkulosis yang ada diperoleh kepada Puskesmas setempat serta integrasi oleh program lain di Puskesmas dalam upaya penemuan kasus suspek Tuberkulosis baik secara pasif maupun aktif. Ditambah lagi dengan belum maksimalnya komitmen lintas sektor (kelurahan, kecamatan) dalam rangka penemuan kasus suspek Tuberkulosis.
4. Pelayanan Kesehatan terhadap orang dengan risiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) hanya mencapai 13.549 orang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 15.549 orang atau sebanyak 87,14%. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya peran lintas sektor dan lintas program dalam upaya penjangkauan populasi berisiko dan kelompok kunci HIV untuk dilakukan konseling dan pemeriksaan HIV. Populasi berisiko tersebut adalah ibu hamil, pasien IMS, pasien Tuberculosis. Kelompok populasi kunci yaitu kelompok SLS, waria, pengguna jarum suntik, warga binaan lembaga pemasyarakatan. Serta belum adanya kader terlatih di setiap Puskesmas yang bertugas secara khusus melakukan penjangkauan orang berisiko HIV.
5. Penguatan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain: masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan dan pembangunan keluarga serta pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi, serta pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB.
6. Tantangan pada pelayanan KB meliputi: angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun, kualitas pelayanan KB belum sesuai standar, rendahnya kesertaan KB untuk pria, serta tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi.

7. Tantangan pada kesehatan reproduksi remaja, antara lain: angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi; masih banyaknya perkawinan usia muda, terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja, dan tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja yang berakibat pada tingginya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan.
8. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain: masih tingginya jumlah keluarga miskin, rendahnya pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak; rendahnya partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, rendahnya kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia, dan terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga

2.2.2. Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.
2. Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang terakreditasi masih rendah/sedikit.
3. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran.
4. Biaya pendidikan sekolah menengah pertama dan tinggi masih membebani orang tua peserta didik, khususnya masyarakat tidak mampu.
5. Sarana dan prasarana gedung tempat pendidikan belum memenuhi standar pelayanan mutu. Keterbatasan dan harga lahan di Bandar Lampung juga menuntut pengembangan pembangunan kearah vertikal dengan utilitas yang modern.
6. Kebutuhan akan adanya pendidikan karakter dan budi pekerti bagi peserta didik.
7. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, seni, bahasa dan sastra daerah.
8. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menyaring masuknya kebudayaan budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal.
9. Belum optimalnya pengelolaan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dari luar daerah dan dunia internasional.

2.2.3. Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

1. Panjang Jalan Kota Bandar Lampung mencapai 1.556,216 km sehingga memerlukan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan.
2. Pemetaan distribusi air masih belum optimal dan belum optimalnya koordinasi antara (PDAM dan Dinas PU).

3. Belum semua penduduk mengelola air limbah yang benar dan ramah lingkungan serta sanitasi lingkungan yang masih rendah.
4. Panjang jaringan drainase Kota Bandar Lampung mencapai 117,551 km, sedangkan panjang sungai Kota Bandar Lampung mencapai 66,952 km, sehingga memerlukan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

TARGET, INDIKATOR, DAN PROGRAM

RAD SDGs Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 merupakan salah satu dasar utama dalam melihat progres pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung. Progress pencapaian target-target SDGs di Kota Bandar Lampung dicoba untuk didokumentasikan dalam dokumen VLR ini walaupun tidak semua tujuan dalam SDGs dapat terliput progresnya. Data indikator yang dapat dikumpulkan serta dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai kebijakan, perencanaan, dan program kegiatan unggulan yang terkait dengan tujuan SDGs tertentu merupakan dasar dari penyusunan dokumen VLR ini. Elaborasi progres dilakukan dengan menggunakan kriteria empat Pilar Pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Bappenas.

3.1. Pilar Pembangunan Sosial

3.1.1. Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana tugas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk di Kota Bandar Lampung. Dalam Pilar Pembangunan Sosial SDGs Indonesia, Dinas PPKB Pemerintah Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 3 (tiga) yaitu “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia” yang selanjutnya diuraikan ke dalam indikator yaitu: Indikator 3.7.1* yaitu memiliki makna bahwa “proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern”; dan Indikator 3.7.2.(a) yaitu “*Total Fertility Rate (TFR)*”. Target pencapaian dalam ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Target Pencapaian SDGs 3 (Sumber: Dinas PPKB Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Renstra OPD	%		34,68	36,78	37,55	38,65	39,70
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR)	Renstra OPD	%		2,37	2,35	2,30	2,25	2,20

Dari Tabel 3.1 di atas terlihat target pencapaian untuk Indikator 3.7.1* “persentase proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern” meningkat setiap tahunnya. Semakin tinggi persentase *demand satisfied* menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Target pencapaian Indikator 3.7.2.[a] “*Total Fertility Rate (TFR)*” yaitu jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksi, menurun setiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan pengembangan program penurunan tingkat kelahiran.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Dinas PPKB Pemerintah Kota Bandar Lampung menurunkan beberapa program dan atau kegiatan sebagaimana terlihat dalam tabel 5.1 pada Lampiran. Dari Tabel 5.1 tersebut terlihat bahwa Dinas PPKB Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki tiga kegiatan dalam rangka mencapai terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Ketiga kegiatan tersebut memiliki target yang sama mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan sumber dana yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung sejumlah Rp. 5.182.487.920,31 untuk alokasi lima tahun anggaran.

3.1.3. Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Dalam Pilar Pembangunan Sosial SDGs Indonesia, terdapat juga Tujuan 4 yaitu “Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua” di mana salah satu penanggung jawabnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung. Beberapa indikator dalam Tujuan 4 ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Disdikbud Kota Bandar Lampung yaitu: Indikator 4.5.1* yaitu “(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat” dan “(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat”, serta Indikator 4.c.1* yaitu “Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan”. Target pencapaian dalam indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2. Target Pencapaian SDGs 4 (Sumber: Disdikbud Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 4.5									
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat	RPJMD	Angka	91,32	99,33	99,43	99,53	99,63	99,73
	(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat	RPJMD	Angka	96,37	100,22	104,23	108,4	112,74	117,25
Target 4.c									
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara									

berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	RPJMD	%	83,79	84,84	85,90	86,97	88,06	89,16

Dari Tabel 3.2 di atas terlihat target pencapaian untuk Indikator 4.5.1“(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat” dan “(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat” meningkat setiap tahunnya. Begitu juga target pencapaian untuk Indikator 4.c.1* yaitu “Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan”, yang juga meningkat setiap tahunnya. Indikator-indikator di atas menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas khususnya dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat khususnya pada pendidikan dasar dan dalam meningkatkan kualitas guru. Untuk mencapai target yang telah ditentukan, tentunya Disdikbud Kota Bandar Lampung telah menurunkan beberapa program dan atau kegiatan dengan disertai anggaran yang direncanakan. Namun dikarenakan data yang didapatkan tim penyusun bukan dalam format Matriks 2B maka data tersebut belum dapat disajikan dalam dokumen VLR ini.

3.1.2. Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Dalam Pilar Pembangunan Sosial SDGs Indonesia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 5 (lima) yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender” yang diuraikan dalam beberapa indikator yang terlihat dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Target Pencapaian SDGs 5 (5.1 dan 5.2) (Sumber: Dinas PPPA Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 5.1									
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	APB D	%	100		100	100	100	100
Target 5.2									
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DAK	%	100		100	100	100	100

Dari Tabel 3.2 di atas terlihat target Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam Indikator 5.1.1. yaitu “ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin” mencapai 100%. Sedangkan untuk Indikator 5.2.2 yaitu “proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir”, Dinas PPPA juga menargetkan sampai 100%. Indikator ini mengukur tentang upaya pemerintah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Indikator ini bermanfaat untuk mengukur komitmen negara terhadap upaya pencapaian kesetaraan gender dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada bidang-bidang kebijakan publik, kekerasan terhadap perempuan, lapangan kerja dan ekonomi serta perkawinan dan keluarga.

Untuk mencapai indikator-indikator tersebut Dinas PPPA Kota Bandar Lampung merancang beberapa program dan kegiatan seperti terlihat dalam Tabel 5.2 pada Lampiran. Dari Tabel 5.2 tersebut diketahui Dinas PPPA memiliki sebelas program terkait perlindungan

terhadap perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender. Sebelas program tersebut yaitu:

1. Program perlindungan perempuan
2. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
4. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban tindak kekerasan kewenangan kabupaten/kota (dak)
7. Program perlindungan khusus anak
8. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
9. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
10. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
11. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota (dak)

Selain terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, target pencapaian dalam Tujuan 5 yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender” juga terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung terutama pada Indikator 5.5.2* yaitu “proporsi perempuan yang berada di posisi managerial”. Dari Tabel 3.4 dapat dilihat target pencapaian jumlah perempuan yang duduk di posisi managerial yang cukup konsisten setiap tahunnya. Ini menunjukkan komitmen yang cukup tinggi untuk mencapai target pada Tujuan 4 guna meningkatkan kesempatan dan keterlibatan gender perempuan sebagai peramu dan penentu kebijakan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Komitmen ini kemudian diimplementasikan melalui berbagai program yang salah satunya adalah program Mutasi dan Promosi Aparat Sipil Negara (ASN) setiap tahunnya. Program ini didokumentasikan dengan menggunakan Matriks 2b seperti dalam Tabel 5.3 pada Lampiran.

Tabel 3.4. Target Pencapaian SDGs 5 (5.5) (Sumber: BKD Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 5.5									
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial	BKD	PNS	10	10	10	8	10	10

3.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

3.2.1. Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam Tujuan 8 (delapan) memiliki kontribusi dalam Indikator 8.9.1.(a) yaitu “jumlah wisatawan mancanegara” yang dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bandar Lampung, dan Indikator 8.9.1.(b) yaitu “jumlah kunjungan wisatawan nusantara” yang merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. Target pencapaian pada Tujuan 8 ini tergambar dalam Tabel 3.5 berikut di bawah ini.

Tabel 3.5. Target Pencapaian SDGs 8 (Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 8.9									
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Pendataan langsung ke objek wisata, hotel dan penginapan	orang		1.767	2.000	1.767	1.855	1.948
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Pendataan langsung ke objek wisata, hotel dan penginapan	orang		819.492	215.623	819.492	860.467	903.490

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Dinas Pariwisata menurunkan program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.8 pada Lampiran. Dari Tabel 5.8 terlihat untuk mencapai target di atas, Dinas Pariwisata mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 238.066.948,43 dan Rp. 306.086.076,56 untuk dua kegiatan yaitu Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dalam lima tahun anggaran.

3.2.1. Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Dinas Pekerjaan Umum dalam Tujuan 9 memiliki kontribusi dalam Indikator 9.1.1.(a). yaitu “kondisi mantap jalan nasional” yang merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka *Internasional Roughness Index* (IRI), di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat Roughometer dengan satuan IRI yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilo meter jalan (m/km). Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. 13/PRT/M/2011). Target pencapaian pada Indikator 9.1.1.(a). tergambar dalam Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6. Target Pencapaian SDGs 9 (Sumber: Dinas PU Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 9.1									
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	1. LAKIP TA 2020 2. RENSTRA DPU TA 2021-2026	%	81,64	89,54	85,59	86,59	87,59	88,59

Dari Tabel 3.6 terlihat target pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Indikator 9.1.1.(a). Angka dasar (*baseline*) ditetapkan sebesar 81,64%, namun ternyata capaian target Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung melebihi angka dasar yang ditetapkan. Di tahun 2020 kondisi mantap jalan nasional mencapai 89,54% dan 2024 sebesar 88,59%. Manfaat dari indikator tersebut adalah untuk mengetahui proporsi kondisi jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Dinas PU menurunkan beberapa program dan atau kegiatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.4 pada Lampiran. Dari Tabel 5.4 terlihat untuk mencapai target 88,59% kondisi mantap jalan nasional di tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 415.401.381.113,50 dalam lima tahun anggaran.

3.2.2. Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 10 dalam Pilar Pembangunan Ekonomi SDGs Indonesia khususnya untuk Kota Bandar Lampung. Tujuan 10 yaitu “Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara” yang diturunkan dalam beberapa indikator yaitu Indikator 10.1.1.(b) “jumlah desa tertinggal”, Indikator 10.1.1.(c) “jumlah desa mandiri”, Indikator 10.1.1.(d) “jumlah daerah tertinggal”, Indikator 10.1.1.(e) “rata-rata ekonomi di daerah tertinggal”, dan Indikator 10.1.1.(f) persentase penduduk miskin di daerah tertinggal”.

Untuk mencapai indikator-indikator tersebut di kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Kota Bandar Lampung telah membuat beberapa program sebagaimana terlihat pada Tabel 5.5 pada Lampiran. Dari Tabel 5.5 tersebut dapat terlihat 2 (dua) program Dinas PMK Kota Bandar Lampung untuk mencapai indikator yang telah ditentukan. Terdapat dua program yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Program Administrasi Pemerintahan Desa. Masing-masing program diturunkan dalam dua kegiatan dengan target 126 kelurahan pada program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dan 94 desa di tahun 2024 pada program Administrasi Pemerintahan Desa.

3.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

3.3.1. Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Dalam Pilar Pembangunan Lingkungan SDGs Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung memiliki kontribusi dalam Tujuan 6 (enam) yaitu “Air Bersih dan Sanitasi Layak” dengan Target 6.1 yaitu “mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua” dan Target 6.2 yaitu “mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan di tahun 2030”. Target pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam mencapai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7. Target Pencapaian SDGs 10 (Sumber: Dinas PU Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 6.1									
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	1. LAKIP TA 2020 2. RENSTRA DPU TA 2021-2026	%	44,80	61,8	62,3	62,8	63,3	63,8
Target 6.2									
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	1. LAKIP TA 2020 2. RENSTRA DPU TA 2021-2026	%	35,96	50,88	60,5	61	61,5	62

Dari Tabel 3.7 di atas terlihat target pencapaian Dinas PU Kota Bandar Lampung dalam indikator rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman adalah 63,8% di tahun 2024 dan target rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun sebesar 62% ditahun 2024. Kedua target capaian tersebut jauh di atas angka dasar (*baseline*). Ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari Kota Bandar Lampung dalam mencapai Tujuan 6 (enam).

Untuk mencapai target tersebut Dinas Pekerjaan Umum menurunkan program dan kegiatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.6 pada Lampiran. Dari Tabel 5.6 tersebut dapat diketahui bahwa untuk mencapai Indikator 6.1.1 yaitu “persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman”, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung membuat program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan anggaran Rp. 35.703.752.437,50 dalam lima tahun anggaran.

Selanjutnya untuk mencapai indikator 6.2.1 yaitu “persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun”, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung membuat program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 31.474.724.758,13 dalam lima tahun anggaran.

3.3.2. Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 11 yaitu “Menjadikan Kota Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan” dalam Pilar Pembangunan Lingkungan SDGs Indonesia. Tujuan 11 pada Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki dua target yaitu Target 11.1 “menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh” dan Target 11.7 “menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas”. Target pencapaian Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung sampai tahun 2024 terlihat dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Target Pencapaian SDGs 11 (Sumber: Dinas Perkim Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian (8)				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 11.1									
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan dan Permukiman	%		28,81	32,68	23,63	43,89	64,14
Target 11.7									
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas									
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Dinas Perumahan dan Permukiman	%		4,4	4,4	4,4	4,6	4,8

Dari Tabel 3.8 di atas terlihat target pencapaian Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung terhadap persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 64,14 % dan 4,8% terhadap proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua di tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung merancang program dan kegiatan sebagaimana disusun dalam Tabel 5.7 pada Lampiran. Dari Tabel 5.7 tersebut diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung memiliki dua program yaitu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.344.866.040,85 dalam lima tahun anggaran dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.565.685.894,00 dalam lima tahun anggaran.

3.3.3. Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 12 yaitu “Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan”. Target dan capaian dalam tujuan tersebut dituangkan dalam target 12.b yaitu “mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal”; dan dalam indikator 12.b.1(a) yaitu “jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*”.

Tabel 3.9. Target Pencapaian SDGs 12 (Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian (8)				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 12.b									
Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Dinas Pariwisata	Lokasi	2	2	2	4	4	4

Dari Tabel 3.9 di atas terlihat target pencapaian untuk Indikator 12.b.1(a) yaitu “jumlah lokasi penerapan *Sustainable Tourism Development*” di Kota Bandar Lampung sebanyak 4 lokasi di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut Dinas Pariwisata menurunkan Program dan Kegiatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.8. pada Lampiran. Dari Tabel 5.8 tersebut diketahui bahwa Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung memiliki Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan dua kegiatan yaitu pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota. Namun karena program ini juga dikaitkan dengan Tujuan 8 maka anggarannya pun terhitung menjadi satu. Target dalam kegiatan pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota adalah satu dokumen dan target untuk kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/Kota yaitu 4 lokasi di tahun 2024.

3.3.3. Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 14 yaitu “Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Target pencapaian dalam tujuan tersebut dapat dilihat dalam Target 14.4 yaitu “pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya”. Indikator yang diperlukan adalah Indikator 14.4.1* yaitu “proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman” seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10. Target Pencapaian SDGs 14 (Sumber: DKP Kota Bandar Lampung)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 14.4									
Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya									
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	0,03	0,03	0,031	0,032	0,032	0,033

Dari Tabel 3.10 di atas terlihat target pencapaian untuk Indikator 14.4.1* yaitu “proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman” di Kota Bandar Lampung sebanyak 4 lokasi di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut DKP Kota Bandar Lampung menurunkan program dan kegiatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.9. pada Lampiran. Dari Tabel 5.9 tersebut diketahui bahwa Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung memiliki program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan berupa Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha. Indikatornya adalah jumlah masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha di mana jumlah penerima bantuan ini ditargetkan semakin berkurang dengan maksud bahwa bantuan yang didapatkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan tersebut sehingga di tahun berikutnya tidak memerlukan lagi bantuan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Untuk mengukur langkah-langkah kongkrit yang telah atau akan dilakukan dalam komitmen Kota Bandar Lampung terhadap TPB/SDGs diperlukan suatu tool berupa dokumen yang up-to-date dan efektif dalam mendokumentasikan sekaligus mengkaji progres pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu disusun dokumen Voluntary Local Review (VLR) yang mengacu kepada data dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Dokumen VLR Kota Bandar Lampung tahun 2022 ini disusun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berkolaborasi dengan akademisi dan lembaga terkait dengan melalui tahapan *Forum Group Discussion*, pengumpulan data, pembahasan draft awal, dan finalisasi dokumen akhir.

Pada saat FGD dilakukan identifikasi dan pemetaan data indikator bersama Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen VLR TPB/SDGs Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan panduan dokumen Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Edisi II dari Bappenas. Dari pemetaan kemudian dikumpulkan data-data dari OPD baik yang berupa data dalam format Matriks 1 dan Matriks 2b maupun dokumen-dokumen perencanaan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah dan lembaga terkait. Tidak semua data yang diidentifikasi dan dipetakan dapat ditemukan dan terkumpul. Oleh karena itu dokumen VLR ini disusun berdasarkan data yang tersedia dalam rentang waktu penyusunan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dielaborasi dalam kategori 4(empat) Pilar Pembangunan Berkelanjutan yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Hanya saja untuk Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola tidak dapat dikumpulkan data indikator dan program kegiatan yang relevan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga tidak ada pembahasan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola pada dokumen VLR ini.

Dalam Pilar Pembangunan Sosial terdapat 3 tujuan yang dapat diidentifikasi target dan program untuk pencapaian target tersebut yaitu Tujuan 3 yaitu “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”; Tujuan 4 yaitu “Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua”; dan Tujuan 5 yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.

Yang pertama adalah dari Dinas PPKB Kota Bandar Lampung yang berkontribusi pada Tujuan 3 yang diuraikan dalam indikator-indikator yaitu: Indikator 3.7.1* dan Indikator 3.7.2.(a). Diketahui bahwa target Indikator 3.7.1* meningkat setiap tahunnya. Semakin tinggi persentase *demand satisfied* menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Target pencapaian untuk Indikator 3.7.2.[a] “Total Fertility Rate (TFR)” menurun setiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan pengembangan program penurunan tingkat kelahiran. Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Dinas PPKB Kota Bandar Lampung

memiliki tiga kegiatan dalam rangka mencapai terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Ketiga kegiatan tersebut memiliki target yang sama mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 5.182.487.920,31 untuk alokasi lima tahun anggaran.

Dalam Pilar Pembangunan Sosial, terdapat juga Tujuan 4 di mana salah satu penanggung jawabnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung. Beberapa indikator dalam Tujuan 4 ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Disdikbud Kota Bandar Lampung yaitu: Indikator 4.5.1* dan Indikator 4.c.1*. Diketahui bahwa target pencapaian untuk Indikator 4.5.1* meningkat setiap tahunnya. Begitu juga target pencapaian untuk Indikator 4.c.1* yang juga meningkat setiap tahunnya. Indikator-indikator di atas menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas khususnya dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat khususnya pada pendidikan dasar dan dalam meningkatkan kualitas guru. Untuk mencapai target yang telah ditentukan, tentunya Disdikbud Kota Bandar Lampung telah menurunkan beberapa program dan atau kegiatan dengan disertai anggaran yang direncanakan. Namun dikarenakan data yang didapatkan tim penyusun bukan dalam format Matriks 2b maka data tersebut belum dapat disajikan dalam dokumen VLR ini.

Masih dalam Pilar Pembangunan Sosial SDGs Indonesia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 5 yang diuraikan dalam beberapa indikator. Diketahui bahwa target Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam Indikator 5.1.1 mencapai 100%. Sedangkan untuk Indikator 5.2.2, Dinas PPPA juga menargetkan sampai 100%. Indikator ini mengukur tentang upaya pemerintah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut Dinas PPPA Kota Bandar Lampung merancang sebelas program terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender.

Selain terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, target pencapaian dalam Tujuan 5 yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender” juga terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung terutama pada Indikator 5.5.2*. Diketahui bahwa target pencapaian jumlah perempuan yang duduk di posisi managerial yang cukup konsisten setiap tahunnya. Ini menunjukkan komitmen yang cukup tinggi untuk mencapai target pada Tujuan 4 guna meningkatkan kesempatan dan keterlibatan gender perempuan sebagai peramu dan penentu kebijakan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Komitmen ini kemudian diimplementasikan melalui berbagai program yang salah satunya adalah program Mutasi dan Promosi Aparat Sipil Negara (ASN) setiap tahunnya.

Selanjutnya dalam Pilar Pembangunan Ekonomi terdapat 2 tujuan yang dapat diidentifikasi target dan program untuk pencapaian target tersebut yaitu Tujuan 9 yaitu “Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi”; dan Tujuan 10 yaitu “Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara”.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Tujuan 9 (sembilan) memiliki kontribusi dalam Indikator 9.1.1.(a) yang merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Diketahui target pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Indikator 9.1.1.(a)

untuk angka dasar (*baseline*) ditetapkan sebesar 81,64%. Namun ternyata capaian target Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung melebihi angka dasar yang ditetapkan. Di tahun 2020 kondisi mantap jalan nasional mencapai 89,54% dan 2024 sebesar 88,59%. Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Dinas PU menurunkan beberapa program dan atau kegiatan seperti misalnya untuk mencapai target 88,59% kondisi mantap jalan nasional di tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 415.401.381.113,50 dalam lima tahun anggaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 10 dalam Pilar Pembangunan Ekonomi SDGs Indonesia khususnya untuk Kota Bandar Lampung. Tujuan 10 yaitu “Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara” yang diturunkan dalam beberapa indikator yaitu Indikator 10.1.1.(b), Indikator 10.1.1.(c), Indikator 10.1.1.(d), Indikator 10.1.1.(e), dan Indikator 10.1.1.(f). Untuk mencapai indikator-indikator tersebut di kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Kota Bandar Lampung telah membuat dua program Dinas PMK Kota Bandar Lampung untuk mencapai indikator yang telah ditentukan yaitu: Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Program Administrasi Pemerintahan Desa. Masing-masing program diturunkan dalam dua kegiatan dengan target 126 kelurahan pada program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dan 94 desa di tahun 2024 pada program Administrasi Pemerintahan Desa.

Kemudian dalam Pilar Pembangunan Lingkungan SDGs Indonesia terdapat 4 tujuan yang dapat diidentifikasi target dan program untuk pencapaian target tersebut yaitu Tujuan 6 yaitu “Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi”; Tujuan 11 yaitu “Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan”; Tujuan 12 yaitu “Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan”; dan Tujuan 14 yaitu “Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung memiliki kontribusi dalam Tujuan 6 (enam) yaitu “Air Bersih dan Sanitasi Layak” dengan Target 6.1 yaitu “mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua” dan Target 6.2 yaitu “mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan di tahun 2030”. Diketahui bahwa target pencapaian Dinas PU Kota Bandar Lampung dalam indikator rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman adalah 63,8% di tahun 2024 dan target rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun sebesar 62% ditahun 2024. Kedua target capaian tersebut jauh di atas angka dasar (*baseline*).

Ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari Kota Bandar Lampung dalam mencapai Tujuan 6 (enam). Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung membuat program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan anggaran Rp. 35.703.752.437,50 dalam lima tahun anggaran. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung juga membuat program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 31.474.724.758,13 dalam lima tahun anggaran.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 11 melalui dua target yaitu Target 11.1 “menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh” dan Target 11.7 “menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas”. Diketahui bahwa target pencapaian Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung terhadap persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 64,14 % dan 4,8% terhadap proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung memiliki dua program yaitu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.344.866.040,85 dalam lima tahun anggaran dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.565.685.894,00 dalam lima tahun anggaran.

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 12 yaitu “Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan”. Target dan capaian dalam tujuan tersebut dituangkan dalam target 12.b yaitu “mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal”; dan dalam indikator 12.b.1(a). Diketahui bahwa target pencapaian untuk Indikator 12.b.1(a) di Kota Bandar Lampung sebanyak 4 lokasi di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut Dinas Pariwisata menurunkan Program dan Kegiatan memiliki Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan dua kegiatan yaitu pengelolaan daya tarik wisata dan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota. Namun karena program ini juga dikaitkan dengan Tujuan 8 maka anggarannya pun terhitung menjadi satu. Target dalam kegiatan pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota adalah satu dokumen dan target untuk kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/Kota yaitu 4 lokasi di tahun 2024.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 14 di mana target pencapaian dalam tujuan tersebut dapat dilihat dalam Target 14.4 yaitu “pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya”. Indikator yang diperlukan adalah Indikator 14.4.1*. Diketahui bahwa target pencapaian untuk Indikator 14.4.1* di Kota Bandar Lampung sebanyak 4 lokasi di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut DKP Kota Bandar Lampung memiliki program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan berupa Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha. Indikatornya adalah jumlah masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha di mana jumlah penerima bantuan ini ditargetkan semakin berkurang dengan maksud bahwa bantuan yang didapatkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan tersebut sehingga di tahun berikutnya tidak memerlukan lagi bantuan.

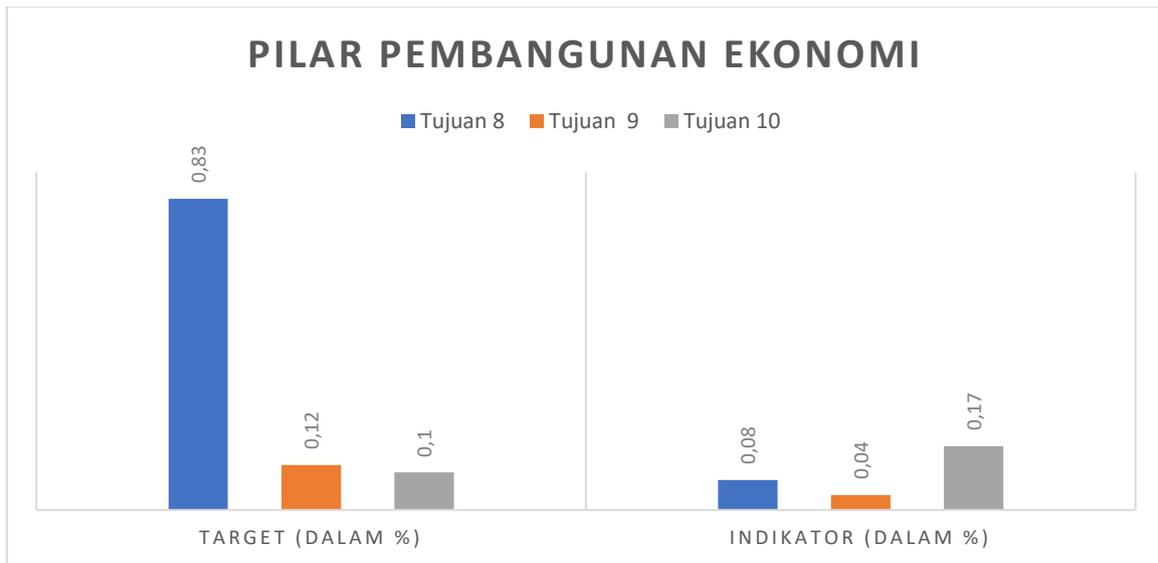
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berupaya memastikan pencapaian TPB/SDGs dalam program dan kegiatan pembangunan terutama dalam Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 3, 4, 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (Tujuan 8, 9, 10), dan Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 14). Secara rinci dapat dilihat bahwa pada:

- Tujuan 3 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 1 dari 12 target dan 2 dari 39 indikator,
- Tujuan 4 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 2 dari 10 target dan 2 dari 18 indikator,
- Tujuan 5 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 2 dari 9 target dan 2 dari 14 indikator,
- Tujuan 6 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 2 dari 8 target dan 2 dari 16 indikator,
- Tujuan 8 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 1 dari 12 target dan 2 dari 25 indikator,
- Tujuan 9 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 1 dari 8 target dan 1 dari 23 indikator,
- Tujuan 10 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 1 dari 10 target dan 5 dari 29 indikator,
- Tujuan 11 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 2 dari 10 target dan 2 dari 28 indikator,
- Tujuan 12 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 1 dari 11 target dan 2 dari 29 indikator,
- dan Tujuan 14 diketahui keterkaitan Perangkat Daerah terhadap 1 dari 10 target dan 1 dari 15 indikator.

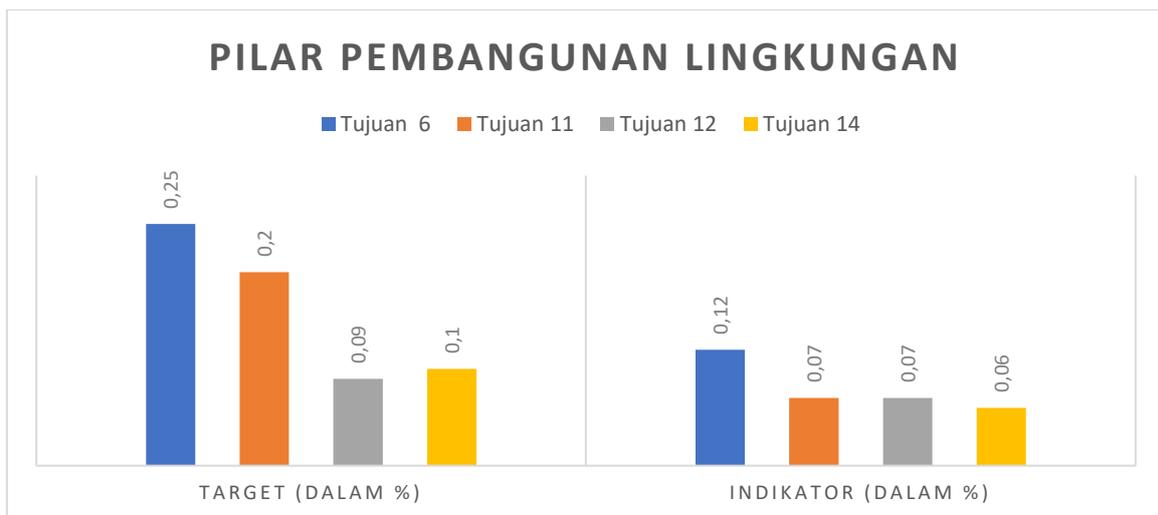
Dari uraian di atas diketahui bahwa dokumen VLR TPB/SDGs Kota Bandar Lampung 2022 ini telah berhasil mengidentifikasi komitmen Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap sebagian target dan indikator dari 10 TPB/SDGs seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 4.3. Sementara untuk target dan indikator pada tujuan-tujuan yang lain belum dapat diidentifikasi keterkaitan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terhadap tujuan-tujuan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan karena kurang lengkapnya data yang didapatkan atau pun memang dikarenakan belum terakomodirnya target dan indikator dari tujuan-tujuan tersebut dalam program dan kegiatan pemerintah daerah. Atau memang target dan indikator yang ingin dicapai bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat.



Gambar 4.1. Target dan Indikator Pilar Sosial pada Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung



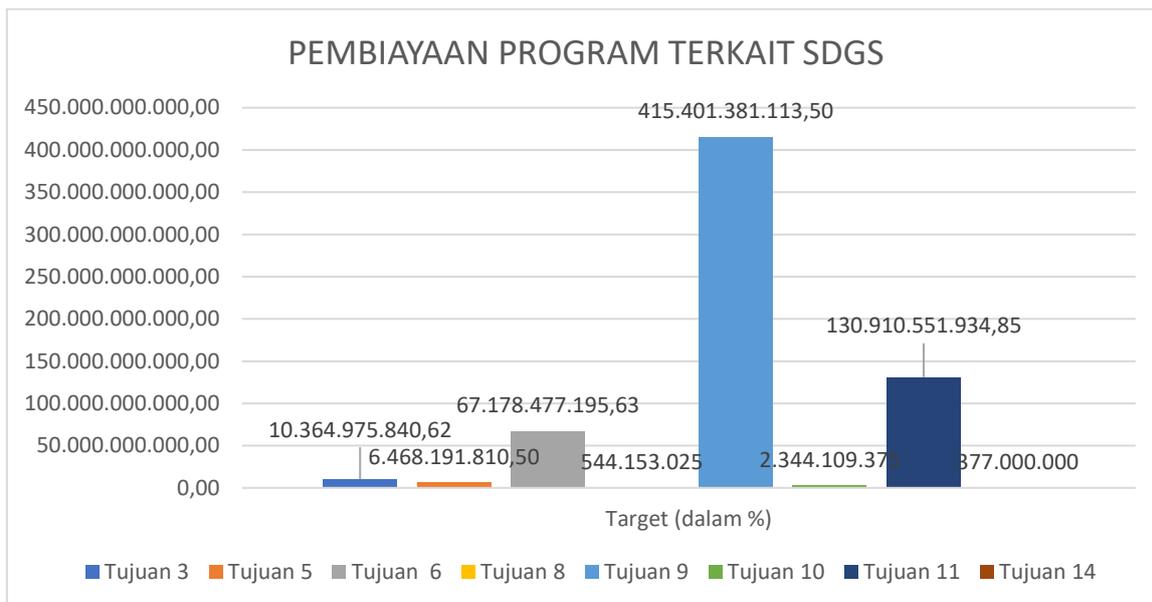
Gambar 4.2. Target dan Indikator Pilar Ekonomi pada Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung



Gambar 4.3. Target dan Indikator Pilar Lingkungan pada Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Dari hasil di atas dapat disimpulkan juga bahwa 10 tujuan tersebut merupakan modal dasar untuk membuat prioritas dalam pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan telah ditemukannya keterkaitan antara target SDGs dan program kegiatannya yang ditetapkan untuk mencapainya dalam Perangkat Daerah terkait. Juga indikator dan data-data yang harus dilengkapi untuk memperoleh indikator pun sudah jelas sehingga memudahkan dalam proses monev. Adanya program dan kegiatan pada Perangkat Daerah tersebut juga menandakan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau implementasi program. Dari 10 tujuan tersebut diketahui total anggaran sebesar Rp. 633.588.840.295,00 telah disiapkan untuk pencapaian target-target TPB/SDGs, seperti dapat dilihat pada Gambar

4.4. Dari rincian alokasi pembiayaan ini dapat terlihat bahwa walaupun 10 tujuan dari 17 TPB/SDGs telah teridentifikasi target dan indikatornya pada Perangkat Daerah, namun hanya 8 tujuan yang memiliki anggaran yang terkait jelas dan langsung dengan pencapaian target tujuan masing-masing. Dan dari ke-8 tujuan yang terbagi ke dalam masing-masing Perangkat Daerah ini terlihat ketimpangan anggaran yang cukup tinggi di mana anggaran untuk Tujuan 9 (sembilan) yang terkait dengan infrastruktur berkelanjutan memiliki anggaran yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pada tujuan yang lain. Tujuan 11 yang menempati urutan kedua pun hanya sekitar sepertiga dari anggaran dari Tujuan 9 (sembilan). Ini dapat mengindikasikan bahwa prioritas pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung masih terfokus pada pembangunan fisik.



Gambar 4.4. Alokasi Pembiayaan Terkait SDGs pada Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

4.2. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran terkait dengan progres pencapaian TPB/SDGs di Kota Bandar Lampung. Dokumen *Voluntary Local Review (VLR)* yang mengacu kepada data dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas diperlukan untuk mengukur langkah-langkah kongkrit yang telah atau akan dilakukan dalam komitmen Kota Bandar Lampung terhadap TPB/SDGs diperlukan suatu tool berupa dokumen yang up-to-date dan efektif dalam mendokumentasikan sekaligus mengkaji progres pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu diperlukan kelengkapan data-data dari OPD baik yang berupa data dalam format Matriks 1 dan Matriks 2b maupun dokumen-dokumen perencanaan program dan kegiatan dari OPD dan lembaga terkait. Dengan begitu dokumen VLR TPB/SDGs yang akan disusun kembali di tahun-tahun mendatang dapat menjadi lebih representative dalam merekam progres TPB/SDGs di Kota Bandar Lampung.

Diketahui juga bahwa tidak semua tujuan dapat terpetakan keterkaitannya dengan tupoksi OPD Kota Bandar Lampung pada dokumen VLR TPB/SDGs Kota Bandar Lampung tahun 2022 ini sehingga perlu juga disarankan untuk meningkatkan keterkaitan target-target TPB/SDGs pada tupoksi dan rencana kerja seluruh OPD di Kota Bandar Lampung. Juga perlu adanya keseimbangan pada prioritas dan alokasi pembiayaan untuk pencapaian TPB/SDGs untuk bidang-bidang non fisik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

Tabel 5.1. Program Terkait SDGs 3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksanaa	
		2020	2021	2022	2023	2024					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
Target 3.1: Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
INDIKATOR SDGs 3.7.1: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiii serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan						5.182.487.920,31	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPKB
Penyusunan rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALKON) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah distribusi Alkon dan sarana penunjang pelyanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya di Kota Bandar Lampung	Faskes	102	102	102	102	102	306.086.076,56	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPKB
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Sarana penunjang pelayanan KB	Orang	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	2.555.636.718,75	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPKB

Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB pada mobil unit pelayanan (MUYAN)	Kecamatan	20	20	20	20	20	2.320.765.125,00	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPKB
---	---	-----------	----	----	----	----	----	------------------	------	---------------------	------------

Sumber: Dinas PPKB Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Tabel 5.2. Program Terkait SDGs 5 (5.1 & 5.2)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
Tujuan 5 KESETARAAN GENDER										
INDIKATOR SDGs 5.1.1: Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin										
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif						793.734.675,00	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota						793.734.675,00	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Kali		10	10	10	10	365.250.000,00	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Orang		50	50	50	50	428.484.675,00	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA
Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif							41.139.772,50	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan							41.139.772,50	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA
	Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif										
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perkawinan Anak yang Bekerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak	%		100	100	100	100	41.139.772,50	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA
INDIKATOR SDGs 5.2.2: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir											

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan							749.081.696,50	DAK	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus	20	20	20	20		749.081.696,50	DAK	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat							955.382.610,00	DAK	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		100	100	100	100	955.382.610,00	DAK	Kota Bandar Lampung	Dinas PPPA
--	--	---	--	-----	-----	-----	-----	----------------	-----	---------------------	------------

Sumber: Dinas PPPA Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Tabel 5.3. Program Terkait SDGs 5 (5.5)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Indikator TPB/SDGs 5.5.2*: Persentase Perempuan yang Menduduki Jabatan Esselon II													
5.03.02 Program Kepegawaian Daerah													
5.03.02.2.0	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	PNS	10	10	8	10	10	554.639.855,00	APBD	Bandar Lampung	BKD

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung, Tahun 2022

Tabel 5.4. Program Terkait SDGs 9

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksanaan
					2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.													
Kode dan Nama Program: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.													
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	%	89,54	85,59	86,59	87,59	88,59	415.401.381.113,50	APBD dan DAK	Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Tahun 2022

Tabel 5.5. Program Terkait SDGs 10

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksanaan	
		2020	2021	2022	2023	2024					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal.											
10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri											
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal.											
10.1.1.(e) Rata-Rata Ekonomi di daerah Tertinggal											
10.1.1.(f) Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal											
2.07.2.07.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN											
2.07.2.07.01.15.02.	Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi	Kelurahan yang perkembangannya telah dievaluasi	126					350.000.000	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2.01.2.07.01.15.06.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengolahan Data Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang ada	126					180.000.000	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2.13.04. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
2.13.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kelurahan yang perkembangannya telah dievaluasi		63	63	94	94	902.329.688	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2.13.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang ada		63	63	94	94	911.779.687	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Dinas PMK Pemerintah Kota Bandar Lampung, Tahun 2022

Tabel 5.6. Program Terkait SDGs 6

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksanaan
					2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Indikator TPB/ 1.1*: Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.													
6.1.1*: Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.													
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	%	61,8	62,3	62,8	63,3	63,8	35.703.752.437,50	APBD dan DAK	Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum
Indikator TPB/SDGs 6.2.1*: Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.													
6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.													
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.05.2.01.12	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	%	50,88	60,5	61	61,5	62	31.474.724.758,13	APBD dan DAK	Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Tabel 5.7 Program Terkait SDGs 11

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksanaan	
				2020	2021	2022	2023	2024					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Indikator TPB/SDGs: Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.													
Program Kawasan Permukiman													
1.4.3.2.01	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.4.3.2.01.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	%	28,81	32,68	23,63	43,89	64,14	109.344.866.040,85	APBD & DAK	Kota Bandar Lampung	Disperkim
Indikator TPB/SDGs: Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas													
Kode dan Nama Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang													
1.3.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1.3.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	%	4,4	4,4	4,4	4,6	4,8	21.565.685.894,00	APBD	Kota Bandar Lampung	Disperkim

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Bandar Lampung, Tahun 2022

Tabel 5.8. Program Terkait SDGs 12

Program/Kegiatan/SubKegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Predanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksanaan (7)
					2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.b1 (a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development													
3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata													
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Dok	1	1	1	1	1	238.066.948	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas Pariwisata
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.03	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	Lokasi	2	2	2	4	4	306.086.077	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas Pariwisata

Sumber: Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Bandar Lampung, Tahun 2022

Tabel 5.9. Program Terkait SDGs 14

Program/Kegiatan/SubKegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksanaan (7)
					2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:		: 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman											
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap													
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Nelayan		500	200	150	100	377.000.000	APBD	Kota Bandar Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Tahun 2022